



LURAH BANTUL
KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN BANTUL
NOMOR **6** TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH BANTUL,

Menimbang : a. bahwa Anggaran dan Belanja Kalurahan adalah rencana tahunan Pemerintah Kalurahan;

b. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Bantul, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2023 tentang pengelolaan dana transfer ke daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6883);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
23. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
24. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
25. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Urusan Keistimewaan di Kalurahan/Kelurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 32);
26. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24)
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 160);
30. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
31. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);

32. Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134);
33. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 77);
34. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
35. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
36. Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 3);
37. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 52);
38. Peraturan Desa Bantul Nomor 05 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Bantul Tahun 2019 Nomor 05);
39. Peraturan Kalurahan Bantul Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Bantul (Lembaran Kalurahan Bantul Tahun 2020 Nomor 1);
40. Peraturan Kalurahan Bantul Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Bantul (Lembaran Kalurahan Bantul Tahun 2020 Nomor 2);
41. Peraturan Kalurahan Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Tanah Kalurahan Bantul (Lembaran Kalurahan Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
42. Peraturan Kalurahan Bantul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Bantul Nomor 9 Tahun 2020 tentang Badan Usahan Milik Kalurahan (Lembaran Kalurahan Bantul Tahun 2021 Nomor 4);
43. Peraturan Kalurahan Bantul Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Bantul Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Bantul (Lembaran Kalurahan Bantul Tahun 2021 Nomor 8);

44. Peraturan Kalurahan Bantul Nomor 4 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Kalurahan Bantul Tahun 2022 Nomor 4);
45. Peraturan Kalurahan Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Bantul Tahun 2022 Nomor 5);
46. Peraturan Kalurahan Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas (Lembaran Kalurahan Bantul Tahun 2023 Nomor 2);
47. Peraturan Kalurahan Bantul Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah di Kalurahan Bantul (Lembaran Kalurahan Bantul Tahun 2023 Nomor 4);
48. Peraturan Kalurahan Bantul Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Tertib Musyawarah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Bantul Tahun 2023 Nomor 5);
49. Peraturan Kalurahan Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Lain – lain Pendapatan Asli Kalurahan Yang Sah (Lembaran Kalurahan Bantul Tahun 2023 Nomor 6);
50. Peraturan Kalurahan Bantul Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Bantul Tahun 2024 Nomor 2);
51. Peraturan Kalurahan Bantul Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorar Kalurahan dan Bamuskal (Lembaran Kalurahan Bantul Tahun 2023 Nomor 4);
52. Peraturan Kalurahan Bantul Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Kalurahan Bantul Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Bantul Tahun 2024 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANTUL

dan

LURAH BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025, berjumlah Rp. 6.280.938.147,- (Enam Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Seratus Empat Puluh Tujuh Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan

1.1 Pendapatan Asli Kalurahan	Rp. 978.728.380,-
1.2 Transfer	Rp. 4.528.743.073,-
1.3 Pendapatan Lain-lain	Rp. 13.000.000,-
Jumlah Pendapatan	Rp. 5.520.471.453,-

2. Belanja Kalurahan

2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	Rp. 2.931.568.690,-
2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 2.318.801.027,-
2.3. Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp. 248.231.370,-
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 598.963.881,-
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Kalurahan	Rp. 183.373.179,-
Jumlah Belanja	Rp. 6.280.938.147,-

3. Pembiayaan Kalurahan

3.1 Penerimaan Pembiayaan	Rp. 760.466.694,-
3.2 Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,-
Jumlah Pembiayaan	Rp. 760.466.694,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Kalurahan Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 Desember 2024

LURAH BANTUL,

ttd

SUPRIYADI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 30 Desember 2024

CARIK BANTUL,

ttd

RETNA HANDAYANI

LEMBARAN KALURAHAN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR 6
NOREG PERATURAN KALURAHAN BANTUL KAPANEWON BANTUL
KABUPATEN BANTUL (30/Kalurahan Bantul/2024)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. LURAH BANTUL

CARIK

u.b. Kepala Urusan Pangripta



FUAD YUDHI SYAKURI